

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Antaranews.com
Media Cetak	

DPRD minta Pemprov DKI perbaiki kualitas APBD untuk rawat Jakarta

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merawat Jakarta. "Karena Jakarta ini Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Prasetyo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.

Untuk itu, dalam Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Prasetyo meminta Pemprov DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas sehingga APBD DKI Jakarta berkualitas.

Prasetyo telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Berdasarkan pelaksanaannya Musrenbang tersebut, Prasetyo melihat banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.

"Jadi Pak wali kota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan," ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membuat terobosan.

"Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah tinggi," katanya.

"Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, meski telah dilaksanakan program kegiatan prioritas pada anggaran perencanaan, ada beberapa tantangan yang juga turut diperhatikan, seperti keterbatasan APBD yang dapat mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruktur perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Lalu, perubahan paradigma dalam implementasi kegiatan berstandar internasional, dan penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru untuk mewujudkan kota global yang kompetitif.

Adapun Musrenbang RKPD 2025 dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian program prioritas perangkat daerah 2025 terhadap penyelesaian isu-isu prioritas tahun 2025.

Musrenbang RPJPD 2025-2045 bertujuan menanamkan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan Jakarta untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dan selaras dengan RPJP Nasional.

Pewartanya: Siti Nurhaliza

Editor: Sri Muryono